



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 3 NOMOR 2 (NOVEMBER 2022)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

ANALISIS PENGARUH BELANJA LANGSUNG, BELANJA TIDAK LANGSUNG, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP STRUKTUR EKONOMI PRIMER PROVINSI BENGKULU

Dio Prasetyo^a, Barika^b, Septriani^{c*}, Armelly^d

^{a,b,c,d} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Indonesia

*septriani@unib.ac.id

Diterima: Oktober 2022. Disetujui: November 2022. Dipublikasikan: November 2022.

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the effect of direct expenditure, indirect expenditure, and population on the primary economic structure in Bengkulu Province. The analytical method used in this research is panel data regression analysis which is a combination of time series data and cross-section data. The data used in this research is secondary data obtained from the Central Statistics Agency of Bengkulu Province during 2010-2020 as well as other supporting reports. The data collected are direct expenditure, indirect expenditure, and population. The data used in this study is secondary data obtained from the Central Statistics Agency for 2010-2020 as well as other supporting reports. Based on the panel data regression results, the best model obtained in this study is the random effect model. The results of the study show that indirect spending and population have a significant effect on the primary economic structure in Bengkulu Province, while direct expenditure has no effect on the primary economic structure in Bengkulu Province. While simultaneously direct expenditure, indirect spending, and total population have a significant impact on district/city regional spending in Bengkulu Province with an R-squared amount of 93 percent.

Keywords: *Direct expenditure, Indirect Expenditure, Population, Primary Economic Structure.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung, dan jumlah penduduk terhadap struktur ekonomi primer di Provinsi Bengkulu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang merupakan kombinasi data *time series* dan data *cross section*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu selama tahun 2010-2020 serta laporan pendukung lainnya. Data yang dikumpulkan adalah belanja langsung, belanja tidak langsung dan jumlah penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2010-2020 serta laporan pendukung lainnya. Berdasarkan hasil regresi data panel, model terbaik yang diperoleh dalam penelitian ini adalah *random effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja tidak langsung dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap struktur ekonomi primer di Provinsi Bengkulu sedangkan belanja langsung tidak berpengaruh terhadap struktur ekonomi primer di Provinsi Bengkulu. Adapun secara bersama-sama belanja langsung, belanja tidak langsung dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dengan besaran R-squared sebesar 93 persen.

Kata Kunci: Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Penduduk, Struktur Ekonomi Primer.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang telah ditunjukkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi. Terciptanya landasan yang kokoh bagi struktur perekonomian untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan bangsa merupakan tujuan utama pembangunan nasional.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki empat dimensi utama antara lain pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, perubahan atau transformasi ekonomi, dan transisi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan dan kemiskinan, serta mendukung pembangunan itu sendiri, memerlukan transformasi mitigasi.

Perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya yang saling berhubungan dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah. Suatu daerah dikatakan maju apabila memenuhi standar pengetahuan masyarakat yang tinggi, memiliki sumber daya alam yang memadai yang dikelola oleh sumber daya manusia, dan memiliki potensi yang tinggi untuk kemajuan pembangunan daerah. Transformasi struktur

ekonomi yang ditandai dengan pergeseran komposisi (PDRB), dari sektor pertanian dan sektor manufaktur ke sektor jasa, merupakan salah satu langkah proses yang paling penting. Akibatnya, perekonomian menuntut agar struktur perekonomian diubah selama pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang terletak di sebelah barat pegunungan bukit barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.019.848 jiwa yang terdiri atas 1.028.893 jiwa penduduk laki-laki dan 990.920 jiwa penduduk perempuan di tahun 2020 (BPS). Provinsi Bengkulu berperan dalam perekonomian nasional, khususnya pada sektor primer tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. PDRB dapat digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi daerah (Sukirno, 2006).

Jika dilihat berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan 2010-2020 di Pulau Sumatera, maka Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang memberikan kontribusi PDRB terendah di dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 terhadap PDRB Pulau Sumatra (Persen)

No.	Provinsi	PDRB					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	5,74	5,69	5,64	5,59	5,54	5,49
2	Sumatera Utara	22,48	22,67	22,86	23,05	23,24	23,43
3	Sumatera Barat	7,17	7,27	7,37	7,47	7,57	7,67
4	Riau	22,89	22,46	22,03	21,6	21,17	20,74
5	Jambi	6,37	6,38	6,39	6,4	6,41	6,42
6	Sumatera Selatan	12,99	13,04	13,09	13,14	13,19	13,24
7	Bengkulu	1,94	1,95	1,96	1,97	1,98	1,99
8	Lampung	10,17	10,25	10,33	10,41	10,49	10,57
9	Kep. Bangka Belitung	2,34	2,33	2,32	2,31	2,3	2,29
10	Kepulauan Riau	7,91	7,96	8,01	8,06	8,11	8,16

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Meskipun demikian, PDRB Provinsi Bengkulu tetap menunjukkan perkembangan sektor perekonomian dari tahun ke tahun. Hal

ini dapat dilihat dari peningkatan kontribusi PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga konstan 2010-2020. Pada Tabel 2 berikut

dapat dilihat bahwa di Provinsi Bengkulu mengalami pergeseran struktur perekonomian yaitu dengan menurunannya

kontribusi PDRB dari sektor primer serta meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier.

Tabel 2. Perkembangan Sektor-Sektor dan Kontribusinya Berdasarkan PDRB Harga Konstan 2010 di Provinsi Bengkulu

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)			Kontribusi %		
	Primer	Sekunder	Tersier	Primer	Sekunder	Tersier
2016	13.024,5	4.435,2	22.616,9	32,5	11,1	56,4
2017	13.412,2	4.645,4	23.015,4	31,9	11,4	54,7
2018	13.833	4.882,8	25.455,5	31,3	11,1	57,6
2019	14.267,8	5.106,6	26.987,57	30,8	11	58,2
2020	14.331,1	5.051,8	26.995,62	30,9	11	58,2

Sumber: BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka, 2015-2020

Guna mendorong perkembangan dan pembangunan ekonomi daerah, maka pemerintah melakukan berbagai macam kebijakan, salah satunya yaitu melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah di berbagai bidang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran (belanja) pemerintah daerah dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Di Provinsi Bengkulu, belanja tidak langsung merupakan belanja yang paling dominan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Belanja Pemerintah Provinsi Bengkulu Menurut Jenis (Ribu Rupiah) 2010-2020

Tahun	BL	BTL
2010	449.562.954	521.635.607
2011	515.176.929	494.038.124
2012	731.660.414	786.792.391
2013	931.694.776	795.311.582
2014	1.025.967.285	908.754.313
2015	1.231.570.330	1.027.126.706
2016	935.429.609	1.094.260.686
2017	1.366.961.042	1.500.252.285
2018	1.357.167.173	1.622.411.064
2019	1.549.903.007	1.568.400.512
2020	998.877.305	1.699.580.773

Sumber: BPS, Provinsi Bengkulu

Secara umum pengeluaran pemerintah berdasarkan data APBD dari tahun 2010-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi belanja langsung 2020 mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan peralihan dana APBD untuk dana kesehatan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini pula yang diduga memengaruhi struktur ekonomi sektor primer

di Provinsi Bengkulu. Semakin besar pengeluaran yang dilakukan pemerintah maka semakin cepat terjadinya pergeseran struktur ekonomi suatu daerah. Selain itu, perkembangan ekonomi suatu daerah juga sangat bergantung pada pemecahan masalah pokok seperti penggunaan maksimal dari sumberdaya manusia (Irawan, 2014). Jika dilihat dari segi sumber daya manusia, maka

jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Bengkulu sebanyak 2.010.670 jiwa. Jika dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk Tahun 2010, maka jumlah penduduk Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 1,55 persen, dengan rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan yaitu sebesar 105 (Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, 2021).

Berdasarkan uraian di atas peneliti memandang perlu melakukan analisis pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung dan jumlah penduduk terhadap struktur ekonomi primer di Provinsi Bengkulu.

II. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kajian ini akan memanfaatkan data PDRB, belanja langsung dan tidak langsung, jumlah penduduk, dan informasi dari publikasi BPS dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sementara itu, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini.

Analisis regresi data panel digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini dimana data *cross sectional* dan *time series* digabungkan dalam data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 BL_{it} + \beta_2 BTL_{it} + \beta_3 JP_{it} + e$$

Keterangan:

Y = Kontribusi Sektor Primer

- β_0 = Konstanta
- β_{1-3} = Koefisien Regresi
- BL_{it} = Belanja Langsung
- BTL_{it} = Belanja Tidak Langsung
- JP_{it} = Jumlah Penduduk
- e = *Standard Error*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Dalam analisa regresi data panel terdapat beberapa tahapan untuk memilih model yang terbaik. Tahapan-tahapan tersebut adalah Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier. Uji chow merupakan sebuah pengujian yang dilakukan untuk menentukan model mana yang akan dipilih antara *common effect* dan *fixed effect*. Hasil uji chow menunjukkan nilai Probabilitas *Cross-section Chi-square* = 0,0000 < 0,05 sehingga model yang digunakan dari uji chow tersebut adalah model estimasi *Fixed Effect*.

Uji hausman merupakan pengujian lanjutan yang digunakan untuk menentukan model mana yang paling tepat antara *random effect model* dan *fixed effect model*. Berdasarkan hasil uji hausman diperoleh hasil bahwa estimasi terbaik adalah *random effect*. Uji LM digunakan dalam menentukan model mana paling tepat untuk digunakan apakah *common effect model* atau *random effect model* yang pling tepat digunakan. Berdasarkan hasil uji pemilihan model, ditemukan bahwa model yang tepat untuk menganalisis penelitian ini adalah *model random effect*.

Tabel 4. Hasil Regresi Utama Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2,632081	0,899040	2,927656	0,0000
BL	0,023014	0,013949	1,649890	0,1019
BTL	0,221641	0,017175	12,90503	0,0000
JP	0,545137	0,095657	5,698872	0,0000
Random Effects (Cross)				
BS--C	-0,060077			
RJ--C	0,030767			
BU--C	0,198795			
KAUR--C	0,106479			
SLUMA--C	0,017678			
MK--C	0,073224			
LBG--C	-0,050704			
KPH--C	0,046628			

BENTENG--C	0,212891
KTBKL--C	-0,575682
R-squared	0,932906
Adjusted R-squared	0,931007
F-statistic	491,2876
Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber: Eviews9, (data diolah)

Selanjutnya pada penelitian ini telah dilakukan uji signifikansi yaitu uji koefisien determinasi (R^2), Uji F dan Uji t. Berdasarkan uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh hasil bahwa nilai R-squared (R^2) sebesar 0,932906 yang artinya variasi struktur ekonomi primer di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas dalam penelitian ini yaitu belanja langsung, belanja tidak langsung, dan jumlah penduduk sebanyak 93 persen sedangkan sisanya sebanyak 7 persen dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar penelitian. Sementara itu, berdasarkan uji F diperoleh nilai probabilitas (F-Statistik) sebesar $0,00 < 0,05$ yang artinya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan atau secara simultan variabel belanja langsung, belanja tidak langsung, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap variabel struktur ekonomi primer di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, berdasarkan uji t diperoleh hasil bahwa variabel belanja langsung (BL) mempunyai nilai probabilitas sebesar $0,1019 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya belanja langsung tidak berpengaruh terhadap struktur ekonomi primer di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Variabel belanja tidak langsung (BTL) mempunyai nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya belanja tidak langsung berpengaruh terhadap struktur ekonomi primer di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Variabel Jumlah penduduk (JP) mempunyai nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya jumlah penduduk berpengaruh terhadap struktur ekonomi primer di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan *random effect model* didapat nilai koefisien sebesar 0,023014 dan probabilitas

variabel belanja langsung sebesar 0,1019, nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat kesalahan yang digunakan yakni $\alpha=5\%$ (0,05) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel belanja langsung berpengaruh terhadap struktur ekonomi primer pada kabupaten/kota diprovinsi bengkulu. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan belanja langsung sebesar 1 persen maka struktur ekonomi primer akan mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeclien Elfiani Sendow, Debby Ch. Rotinhulu, George M.V Kawung yang berjudul *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap PDRB di kota Manado* yang mengatakan bahwa variabel belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Selain itu, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis di mana yang seharusnya belanja langsung berpengaruh terhadap struktur ekonomi, justru malah sebaliknya. Hal ini disebabkan karena belanja langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu masih belum tepat sasaran, terutama untuk peningkatan sektor primer di Provinsi Bengkulu. Seperti yang dikemukakan oleh Rudibdo dan Sasana (2017) bahwa belanja yang tepat sasaran dan efisien dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Paseki dkk. (2014), belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam kualitas pelayanan publik dan keberpihakan daerah kepada kepentingan publik. Selain itu, mayoritas belanja langsung hanya diperuntukkan untuk belanja modal yaitu belanja peralatan dan mesin, belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu belum diprioritaskan untuk peningkatan sektor primer. Kebijakan

yang diambil oleh pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu ini tentunya berdampak pada perekonomian daerahnya.

Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk merangsang peningkatan ekonomi (Sunoto dan Indraswanti, 2021).

Berdasarkan Hasil regresi data panel dengan *random effect model* didapatkan nilai koefisien 0,221641 dan probabilitas variabel belanja tidak langsung adalah sebesar 0,0000, nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat *error* yang digunakan yakni $\alpha=5\%$ (0,05). Dari Hasil tersebut berarti H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel pengeluaran belanja tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat struktur ekonomi primer di Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Hasil ini menunjukkan setiap terjadinya peningkatan belanja tidak langsung sebesar 1 persen maka akan meningkatkan struktur ekonomi primer sebesar 0,22 persen, sebaliknya dengan adanya penurunan belanja tidak langsung sebesar 1 persen maka akan menurunkan struktur ekonomi primer sebesar 0,22 persen.

Seperti yang dikemukakan oleh Tambunan (2001) bahwa perubahan struktur ekonomi juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi, baik intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal kaitannya dengan pengeluaran pemerintah, ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya maka perekonomian juga akan meningkat. Hasil penelitian ini juga menemukan hasil bahwa ketika pemerintah meningkatkan belanja tidak langsung, maka struktur ekonomi primer justru mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena belanja tidak langsung

tersebut telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan sektor primer Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Belanja tidak langsung ini antara lain digunakan untuk belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bagi hasil.

Belanja tidak langsung ini merupakan penggunaan terencana yang tidak langsung terkait dengan pelaksanaan proyek dan latihan. Anggaran belanja tidak langsung memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengembangan sistem pemerintahan serta upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi yang akan dicapai melalui sarana dan tujuan setiap tahapan pembangunan.

Selain itu, menurut Tambunan (2001) pengeluaran pemerintah yang mendorong perekonomian merupakan pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi atau yang mampu memberikan dorongan bagi perkembangan kegiatan ekonomi. Menurut Afiat (2016), dalam hal intervensi pemerintah, kebijakan yang berpengaruh secara langsung terhadap perubahan struktur ekonomi seperti pemberian insentif pada sektor tersebut dan untuk intervensi secara tidak langsung dapat melakukan kegiatan pengadaan infrastruktur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afiat (2016) mengenai analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi di Sulawesi Tenggara yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perubahan struktur ekonomi.

Menurut Indraswanti dan Sunoto (2021), perencanaan pembangunan ekonomi yang berorientasi hanya pada pertumbuhan ekonomi demi posisi daerah di antara daerah lain, tentu akan fokus pada upaya pergeseran struktur ekonomi yang memiliki riwayat pertumbuhan sektoral konsisten tinggi. Kemampuan memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Keunggulan atau daya saing suatu sektor ekonomi bukan saja menjadi alat pemacu pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi juga menjadi indikator

penting sebagai penciptaan lapangan kerja baru dalam jangka panjang agar mampu menyerap tenaga kerja di suatu daerah.

Jumlah penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan hasil regresi data panel dengan *random effect model* didapat nilai koefisien sebesar 0,545137 dan probabilitas variabel Jumlah penduduk sebesar 0,0000, nilai probabilitas tersebut yakni $\alpha=5\%$ (0,05). Dari hasil tersebut berarti H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap struktur ekonomi primer pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Hasil ini menunjukkan setiap terjadinya peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pergeseran struktur ekonomi primer sebesar 0,54 persen.

Pergeseran ini salah satunya disebabkan oleh adanya dampak dari peraturan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui wajib belajar ini telah meningkatkan Rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Bengkulu. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi produktivitas masyarakat tersebut. Seperti yang tertulis dalam teori mengenai *human capital investment* yang berkaitan dengan pembentukan modal manusia, yaitu adanya proses peningkatan jumlah manusia yang memiliki pendidikan, keahlian dan pengalaman dapat menentukan pembangunan dan politik suatu negara (Jhinghan dalam Kodar, 2014). Dalam hal ini, semakin banyaknya masyarakat Provinsi Bengkulu yang memiliki pendidikan tinggi telah menyebabkan masyarakat saat ini memiliki keberanian yang lebih besar untuk masuk atau bersaing dalam dunia kerja guna mencari pekerjaan yang lebih layak. Salah satunya dengan bekerja pada pada sektor industri atau bekerja lebih berani membuka lapangan pekerjaan pada sektor jasa. Sehingga hal itulah yang mendorong terjadinya pergeseran yang pada sektor primer dan semakin beralih pada sektor

sekunder dan jasa lainnya. Menurut Tambunan (2001), hal ini sesuai dengan teori perubahan struktural pada negara berkembang. Negara-negara berkembang pada awalnya lebih mandiri dan berorientasi pada sektor pertanian, namun kemudian bergeser kepada struktur ekonomi yang lebih modern yang sebagian besar didominasi oleh sektor industri dan jasa.

Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh teori *pattern of development*, yang menguraikan mengenai tahapan-tahapan yang terlibat dalam transisi ekonomi negara-negara berkembang dari pertanian tradisional ke industri modern sebagai mesin pertumbuhan. Pertumbuhan sektor industri berkontribusi pada ekspansi ekonomi dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, yang terkait dengan akumulasi modal dan modal manusia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai R-square sebesar 93 persen, yang berarti bahwa kemampuan variabel belanja tidak langsung, belanja langsung dan jumlah penduduk dalam menjelaskan perubahan struktur ekonomi primer di Provinsi Bengkulu sebesar 93 persen dan sisanya ditentukan oleh variabel lain. Hasil uji F menunjukkan secara bersama-sama belanja langsung, belanja tidak langsung dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap struktur ekonomi primer di provinsi Bengkulu. Hasil Uji t menunjukkan bahwa belanja tidak langsung dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap struktur ekonomi primer di Provinsi Bengkulu.

V. SARAN/REKOMENDASI

Adanya ketidaksesuaian hasil penelitian dengan hipotesis, maka untuk penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel lain di luar variabel penelitian ini dan menggunakan jenis dan metode penelitian yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Jurusan

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang telah memberikan bantuan materil dan nonmateril guna penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Afiat, M. N. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Perubahan Struktur Ekonomi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 6(2): 20-26.
- Aswandi, K. (2016). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi dalam Pembangunan Regional di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2010-2020*. <https://www.bps.go.id>
- _____. (2021). *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2010-2020*. <https://www.bps.go.id>
- _____. (2021). *Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2010-2020*. <https://www.bps.go.id>
- Fadilha, D. (2010). *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Sumatra Utara*. Tesis. Medan Universitas Sumatra Utara.
- Jacklien Elfiani Sendow, D. C. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap PDRB Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19(3).
- Idrus, I. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Indraswanti, B. I. E., & Sunoto, S. (2021). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 3(1), 12–26. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v3i1.17288>
- Irawan. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPF.
- Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. *Kajian Fiskal Regional Tahun 2021*. Bengkulu.
- Ketut, N. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengeluaran Pembangunan di Kota Palopo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*.
- Kodar, N. (2014). *Analisis Penaruh Human Capital Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Paseki, Meilen Greri, Amaran Naukoko, Patrick Wauran. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.14(3).
- Ratno, F. A. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Solo Raya 2009-2018. *Journal of Applied Business And Economics (JABE)*, 362-376.
- Rudibdo, & Sasana, H. (2017). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Ekskaresidenan Semarang Pada Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal REP, Riset Ekonomi Pembangunan*, Vol.2 (2), 2015-226.
- Statistik Keuangan. (2021). *Belanja Langsung Perintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2010-2020*. <https://www.bps.go.id>
- Septiani, N. (2019). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Infrastruktur dalam Perspektif Islam*. Skripsi. Lampung: Program Sarjana Universitas Islam Raden Intan.
- Sempurna, S. (2018). *Pengaruh Pengeluaran Publik terhadap Transformasi Struktur Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan*. Tesis. Sumatera Utara: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah dan Pengembangan Perekonomian

(Hukum Wegner) di Negara Berkembang. *Jurnal Info Artha*, 65-89.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.